

BERITA RESMI STATISTIK



Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bengkulu Desember 2017

Bulan Desember
2017 NTP
Provinsi Bengkulu
95,12

- NTP Provinsi Bengkulu bulan Desember 2017 tercatat sebesar 95,12 yang berarti daya beli petani di Provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 4,88 persen. Angka ini lebih rendah dari NTP bulan November 2017 sebesar 95,26 atau turun sebesar 0,14 persen. Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan. Perubahan NTP bulan Desember 2017 untuk masing-masing subsektor dibanding November 2017 adalah sebagai berikut : subsektor tanaman pangan (NTPP) 95,25 (naik 0,07 persen), NTP subsektor hortikultura (NTPH) 116,54 (naik 1,70 persen), NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) 84,63 (turun 1,01 persen), NTP subsektor peternakan (NTPT) 106,22 (turun 0,33 persen) dan NTP subsektor perikanan/nelayan (NTN) 96,34 (naik 0,94 persen). NTP subsektor perikanan tangkap (NTNT) 106,51 (naik 1,05 persen) dan NTP subsektor perikanan budidaya (NTNB) 92,56 (naik 0,90 persen).
- Nilai Tukar Usaha Pertanian tercatat 105,57 atau naik sebesar 0,59 persen bila dibandingkan dengan bulan November 2017 yang tercatat sebesar 104,95. Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) terjadi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perubahan NTUP masing-masing subsektor sebagai berikut: tanaman pangan (0,80 persen), hortikultura (2,52 persen), tanaman perkebunan rakyat (-0,21 persen), peternakan (0,08 persen), perikanan (1,50 persen), perikanan tangkap (1,55 persen) dan perikanan budidaya (1,48 persen).

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

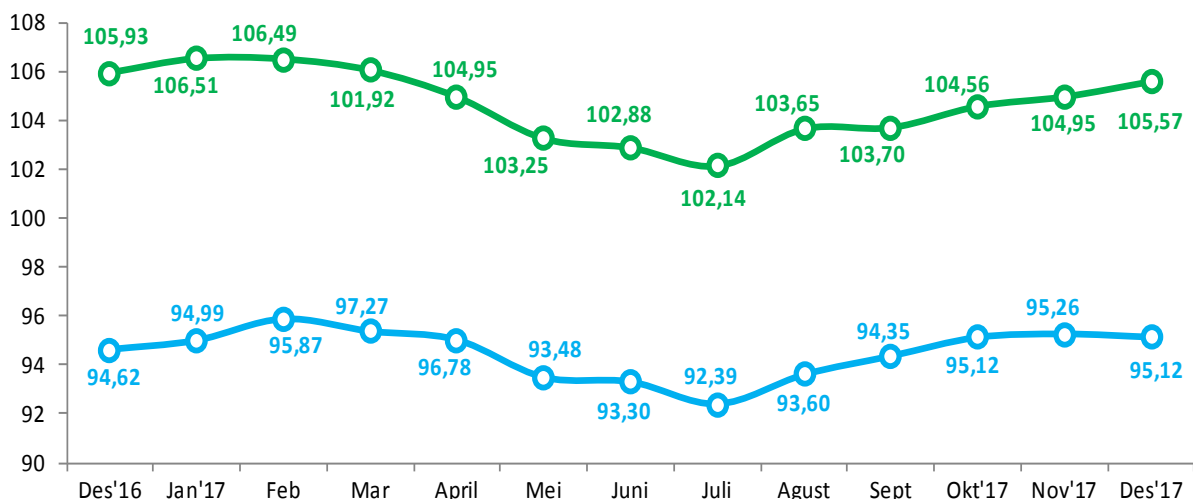
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Bengkulu NTP pada bulan Desember 2017 sebesar 95,12 yang mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dibanding bulan November 2017 yaitu sebesar 95,26. Hal ini terjadi karena kenaikan indeks yang diterima petani sebesar 0,78 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,92 persen.

Bila NTP Desember 2017 dibandingkan dengan NTP November 2017 subsektor perkebunan rakyat dan peternakan yang mengalami penurunan. Perubahan NTP bulan Desember 2017 untuk masing-masing subsektor dibanding November 2017 adalah sebagai berikut : subsektor tanaman pangan (NTPP) 95,25 (naik 0,07 persen), NTP subsektor hortikultura (NTPH) 116,54 (naik 1,70 persen), NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) 84,63 (turun 1,01 persen), NTP subsektor peternakan (NTPT) 106,22 (turun 0,33 persen) dan NTP subsektor perikanan/nelayan (NTN) 96,34 (naik 0,94 persen). NTP subsektor perikanan tangkap (NTNT) 106,51 (naik 1,05 persen) dan NTP subsektor perikanan budidaya (NTNB) 92,56 (naik 0,90 persen).

2. Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mengalami peningkatan sebesar 0,59 persen yaitu dari 104,95 pada November 2017 menjadi 105,57 pada Desember 2017. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,78 persen sedangkan indeks yang dibayarkan petani untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) hanya naik sebesar 0,19 persen.

Grafik 1
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)
Provinsi Bengkulu Desember 2016 – Desember 2017 (2012=100)



Tabel 1
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Per Subsektor Pertanian
Provinsi Bengkulu Bulan November 2017 – Desember 2017
(2012=100)

Subsektor (1)	Bulan		Persentase Perubahan (4)
	November 2017 (2)	Desember 2017 (3)	
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	95,19	95,25	0,07
b. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPP)	106,73	107,59	0,80
2. Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	114,58	116,54	1,70
b. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPH)	128,50	131,74	2,52
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	85,50	84,63	-1,01
b. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPR)	93,68	93,48	-0,21
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	106,57	106,22	-0,33
b. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPT)	114,43	114,52	0,08
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	95,44	96,34	0,94
b. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN)	105,58	107,17	1,50
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan Tangkap (NTNT)	105,40	106,51	1,05
b. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUNT)	114,33	116,11	1,55
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Nelayan Budidaya (NTNB)	91,74	92,56	0,90
a. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUNB)	102,24	103,76	1,48
Pertanian			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	95,26	95,12	-0,14
b. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	104,95	105,57	0,59

3. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

Pada bulan Desember 2017 indeks harga yang diterima petani (It) mengalami peningkatan dibanding November 2017, yaitu dari 123,66 menjadi 124,62 atau naik sebesar 0,78 persen. Perubahan pada masing-masing subsektor adalah sebagai berikut: tanaman pangan (0,95 persen), hortikultura (2,57 persen), tanaman perkebunan rakyat (0,04 persen), peternakan (0,20 persen) dan perikanan (1,94 persen), perikanan tangkap (1,99 persen) dan perikanan budidaya (1,92 persen).

4. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Melalui indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada Desember 2017 indeks harga yang dibayar (Ib) petani dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,92 persen dibanding bulan November 2017, yaitu dari 129,82 menjadi 131,01. Perubahan Ib pada masing-masing subsektor adalah sebagai berikut; tanaman pangan (0,89 persen), hortikultura (0,85 persen), tanaman perkebunan rakyat (1,06 persen), peternakan (0,53 persen), perikanan (0,99 persen), perikanan tangkap (0,92 persen) dan perikanan budidaya (1,02 persen).

Tabel 2
Indeks yang Diterima dan Dibayar Petani Per Subsektor dan Perubahannya
Bulan November 2017 - Desember 2017 (2012=100)

Subsektor (1)	Bulan		Persentase Perubahan (4)
	November 17 (2)	Desember 2017 (3)	
1. Tanaman Pangan			
a. Indeks Diterima Petani	125,56	126,75	0,95
b. Indeks Dibayar Petani	131,90	133,07	0,89
- BPPBM	117,64	117,81	0,15
2. Hortikultura			
a. Indeks Diterima Petani	148,49	152,31	2,57
b. Indeks Dibayar Petani	129,59	130,69	0,85
- BPPBM	115,55	115,61	0,05
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Indeks Diterima Petani	112,34	112,38	0,04
b. Indeks Dibayar Petani	131,39	132,79	1,06
- BPPBM	119,92	120,22	0,25
4. Peternakan			
a. Indeks Diterima Petani	130,69	130,95	0,20
b. Indeks Dibayar Petani	122,64	123,28	0,53
- BPPBM	114,21	114,35	0,12
5. Perikanan			
a. Indeks Diterima Petani	122,65	125,03	1,94
b. Indeks Dibayar Petani	128,50	129,78	0,99
- BPPBM	116,16	116,66	0,43
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Indeks Diterima Petani	134,56	137,23	1,99
b. Indeks Dibayar Petani	127,66	128,84	0,92
- BPPBM	117,70	118,20	0,42
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Indeks Diterima Petani	118,18	120,45	1,92
b. Indeks Dibayar Petani	128,82	130,13	1,02
- BPPBM	115,59	116,09	0,43
Pertanian			
	95,26	95,12	-0,14
a. Indeks Diterima Petani	123,66	124,62	0,78
b. Indeks Dibayar Petani	129,82	131,01	0,92
- BPPBM	117,82	118,04	0,19

Diterbitkan oleh:



BPS Provinsi Bengkulu
Jl. Adam Malik KM. 8
Kota Bengkulu



Budi Hardiyono, S.Si, ME
Kepala Bidang Statistik Distribusi
BPS Provinsi Bengkulu
Telepon: 349117-118
E-mail: budih@bps.go.id
Website : www.bengkulu.bps.go.id



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.